

PROSES IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI  
SMK NEGERI 7 KOTA SEMARANG

Oleh :

Rifka Resi Pawestri, Warsito, Lusia Astrika\*)

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [rifkaresi@gmail.com](mailto:rifkaresi@gmail.com)

**ABSTRACT**

School Operational Assistance Fund is a central government assistance to all schools Elementary and Junior High School, including the Open High School, High School, Vocational High School and The Independent Learning Activities held by the community, both public and private in all provinces in Indonesia. With the School Operational Assistance program funding, schools are required ability to be able to plan, implement and evaluate and be accountable for the management of the educational costs transparent to the public and the government.

The study, titled Process Implementation of School Operational Assistance (BOS) at SMK Negeri 7 Semaarang City aims to determine the process of implementation of the BOS program at SMK Negeri 7 Semarang. In addition, to know the various problems that arise in implementing the Operational School in SMK Negeri 7 Semarang. This study uses a mixed method research with data collection through interviews and questionnaires.

Based on the results of the study showed that the level of effectiveness of the implementation process of the School Operational Assistance (BOS) at SMK Negeri 7 of Semarang is influenced by several factors, factors Human Resources (HR), communication, attitudes implementing and coordinating factor. The problems that must be faced by schools is their failure to provide socialization of BOS to parents, the failure in the manufacture of LPJ, as well as ignorance of the teachers of the operational guidelines BOS policy guidelines. These constraints can occur because BOS Program is a new program so that schools need time to adapt and get used to all regulatory guidelines elaborate guidelines.

**Keywords: the process of implementation, the policy effectiveness of BOS.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan, yang dilakukan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negara. Warga negara sebagai sumber daya manusia (SDM) adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan, karena warga negara merupakan subyek atau pelaku dalam pembangunan itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan pembangunan yang baik, maka negara juga harus memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pemerintah dalam suatu negara memberikan perhatiannya secara serius pada sektor tersebut dengan berusaha memberikan pelayanan secara optimal sehingga mempermudah warga negaranya untuk memperoleh pendidikan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap sektor pendidikan, pemerintah pernah membuat kebijakan pembangunan yang meliputi akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun. Keseriusan Pemerintah juga terbukti dengan kebijakan mengenai Pendidikan Menengah Universal atau Program Wajib Belajar 12 tahun.

Pelaksanaan program BOS dengan kebijakan pendidikan gratis, di satu sisi disambut baik oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. Tetapi di sisi lain, banyak sekolah yang mengakui bahwa program BOS telah membatasi gerak langkah sekolah dalam mengembangkan program pendidikan yang bermutu karena tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, sedangkan dana BOS dirasa kurang memadai. Seperti permasalahan adanya belanja pegawai yang lebih dari 20%. Padahal seharusnya maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri hanya sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS belum bisa menutupi biaya operasional belanja pegawai (biaya honorarium guru dan tenaga pendidik honororer).

Permasalahan yang sama juga terjadi di SMK Negeri 7 Kota Semarang, yaitu dana BOS juga masih belum bisa menutupi banyaknya biaya operasional yang lain, seperti untuk kegiatan siswa di luar jam belajar, ekstrakurikuler hingga lomba siswa di tingkat kota sampai nasional. Di satu sisi, SMK Negeri 7 Semarang merupakan sekolah yang memiliki banyak prestasi. Namun, di sisi lain di SMK Negeri 7 Semarang terdapat banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Alangkah sayangnya apabila ketersediaan SDM yang berkualitas ini tidak diimbangi dengan ketersediaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Berkenaan

dengan mutu pendidikan, hampir semua bangsa-bangsa di dunia ini, tengah berproses untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara masing-masing. Mereka meyakini bahwa kunci masa depan suatu bangsa ditentukan oleh keberadaan sistem pendidikan yang berkualitas.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah implementasi program ini berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga program tersebut tepat sasaran atau tidak.
- (2) Apa saja permasalahan yang timbul dalam proses implementasi.

## **1.3 Landasan Teori**

### **1.3.1 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah hal yang sangat penting karena kebijakan publik menyangkut kepentingan banyak orang. Menurut Thomas Dye (Winarno, 2002:15) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Program BOS merupakan program bantuan kepada sekolah yang bermaksud meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan dalam rangka penuntasan pendidikan, serta dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa bersekolah. Dengan adanya program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas SDM yang ada. Program BOS ini membutuhkan adanya proses pelaksanaan (implementasi). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang mendasar dalam upaya mewujudkannya.

Setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan pasti akan membawa implikasi. Salah satu implikasi kebijakan publik tersebut adalah bahwa suatu kebijakan publik harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan. Jadi, proses kebijakan tidak hanya berhenti ketika sebuah kebijakan itu diputuskan. Kebijakan memerlukan langkah-langkah panjang agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Menurut Wibawa (1994:15) setiap kebijakan publik setidaknya-tidaknya memuat 3 komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Cara untuk mencapai tujuan tersebut biasa disebut sebagai implementasi.

### **1.3.2 Faktor-faktor dalam Proses Implementasi**

Faktor-faktor dalam proses implementasi yang akan dijelaskan disini adalah faktor komunikasi, koordinasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. Keempat faktor

tersebut dipilih dikarenakan dinilai paling sesuai untuk menganalisis proses implementasi Program BOS di tingkat sekolah.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran. Metode penelitian campuran merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data, fakta, informasi yang dilukiskan dalam bentuk angka numerik dan dalam bentuk naratif. Jadi penelitian ini penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Penggunaan dua metode ini dipandang lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada penggunaan salah satu di antaranya karena pendekatan ini lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif.

### **1.4.2 Situs Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian ini ditentukan dengan maksud untuk mempersempit lingkup pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena yang dikaji dengan substansi dari kebijakan yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 7 Semarang.

### **1.4.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai subjek penelitian ataupun informan dari penelitian adalah :

1. Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang
2. Bendahara BOS SMK Negeri 7 Semarang
3. Kepala Bidang Monbang Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Guru dan Anggota Komite Sekolah di SMK Negeri 7 Semarang
5. Siswa dan siswi SMK Negeri 7 Semarang

#### **1.4.4 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah data yang berbentuk data kalimat, data bagan, data tabel, dan gambar.

#### **1.4.5 Sumber Data**

##### **1.4.5.1 Data Primer :**

1. Profil Pendidikan Kota Semarang
2. Hasil Wawancara kepada para informan
3. Hasil Kuesioner yang dibagikan kepada para responden
4. Profil Sekolah SMK Negeri 7 Kota Semarang

##### **1.4.5.2 Data Sekunder :**

1. Dokumen milik Kemendikbud

#### **1.5 Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan secara kualitatif. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan. Wawancara ini dilakukan kepada :

1. Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang selaku Penanggungjawab Program BOS di tingkat sekolah
2. Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
3. Bendahara BOS I SMK Negeri 7 Kota Semarang
4. Bendahara BOS II SMK Negeri 7 Kota Semarang
5. Para guru SMK Negeri 7 Kota Semarang

Wawancara ini dilakukan untuk mengeksplorasi informasi-informasi yang berkenaan dengan proses implementasi Program BOS di SMK Negeri 7 Semarang.

## 2.Kuesioner

Mengingat populasi yang ada cukup heterogen, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berlapis (*stratified random sampling*) dengan pedoman pengambilan sampel responden secara random proporsional berlapis (*stratified proportionate sampling*). Dalam Gulo (2002: 90) kalau besarnya populasi adalah N dan besarnya sampel yang ditarik dari populasi tersebut adalah n, maka proporsinya adalah  $n/N$ . Dari setiap strata ditarik sampel sebanyak  $N/n$  dari jumlah anggota, dan penghitungannya adalah  $n/N \times N$ . Populasi yang ada adalah 1060 orang siswa yang terdiri dari kelas XI sejumlah 540 siswa dan kelas XII sejumlah 520 siswa. Dari populasi sejumlah 1060 orang tersebut ditarik sampel sebanyak 106 orang atau 10% dari jumlah populasi yang ada, dengan penghitungan sebagai berikut :

<u>Strata</u>	<u>Jumlah Anggota</u>	<u>Banyak Sampel</u>
Kelas XI	$N_1 = 540$	$106/1060 \times 540 = 54$
Kelas XII	$N_2 = 520$	$106/1060 \times 520 = 52$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 106 siswa, yang ditarik dari kelas XI sebanyak 54 orang siswa dan kelas XII sebanyak 52 orang siswa.

Selain itu, kuesioner juga dibagikan kepada staff Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berjumlah 8 orang.

Jadi, jumlah seluruh sampel dalam penelitian ini adalah 114 responden, yang terdiri atas 106 siswa SMK Negeri 7 Kota Semarang dan 8 *staff* bidang Monbang Dinas Pendidikan Kota Semarang.

## 3.Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang didukung dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh peneliti. Observasi ada dua macam yaitu observasi sederhana atau juga disebut dengan observasi non-partisipasi, dan observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah observasi jika orang yang mengadakan observasi turut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Sedangkan observasi non-partisipasi adalah observasi yang tidak turut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipasi, artinya peneliti hanya mengamati fenomena yang dihadapi secara sistematis disertai dengan pencatatan secara sistematis guna mendukung data-data yang ada. Observasi ini dapat berupa pengamatan yang bersifat visual yaitu pengamatan pada bentuk, keadaan bangunan, dan ketersediaan fasilitas di SMK Negeri 7 Semarang yang berkaitan dengan proses implementasi Program BOS.

#### **4. Dokumentasi**

Metode ini berupa data sekunder yang dapat diperoleh dari Undang-Undang, dokumen, jurnal.

#### **5. Studi Pustaka**

Metode ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.

### **1.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sedangkan interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada (Barnsley & Ellis, 1992).

### **1.7 Kualitas Data**

Kualitas data dipengaruhi oleh kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

## **2. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK**

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013, diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.

Pada tahun anggaran 2014, Program Bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Peranan program BOS SMK dalam konteks di atas adalah memberikan keadilan dan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mengharapkan sekolah memberikan keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa.

BOS SMK yang diterima oleh sekolah akan diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa SMK pada sekolah tersebut secara rata-rata karena kondisi ekonomi orangtua siswa SMK pada umumnya berada pada tingkat menengah ke bawah.

Adapun pelaksanaan program BOS SMK ini telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SMK Negeri 7 Kota Semarang sebagai salah satu sekolah penerima dana BOS juga diharuskan mematuhi segala bentuk peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersebut. Peraturan-peraturan yang tertuang dalam juklak dan juknis dibuat agar implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini bisa berjalan secara efektif. Tingkat efektivitas program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah :

### **2.1 Sumber Daya Manusia**

SDM merupakan komponen aktif yang mengelola sumber daya yang wujudnya materiil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses implementasi suatu kebijakan/ program diperlukan SDM yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

Pelaksana Program BOS di tingkat sekolah terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dan guru/bendahara sekolah yang ditunjuk dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah. Pelaksana Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang terdiri atas Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sudarmanto sebagai penanggungjawab program di tingkat sekolah, Bapak Sukandar sebagai bendahara BOS I, dan Ibu Woro sebagai pembantu bendahara BOS I atau dapat dikatakan sebagai bendahara BOS II.

Mengingat kualitas SDM dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki dan standar kualifikasi seorang guru yang adalah Strata 1 (S1), para pelaksana (Kepala Sekolah dan Bendahara BOS) telah memenuhi standar kualifikasi yang ada dengan tingkat pendidikan Strata 2 (Kepala Sekolah) dan Strata 1 (Bendahara BOS I dan Bendahara BOS II).

Selain dari tingkat pendidikan, kualitas SDM juga dapat diukur dari pengalaman yang dimiliki. Pelaksana dengan pengalaman yang cukup akan mudah dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik.

Pertimbangan penunjukan Bapak Sukandar sebagai bendahara BOS I adalah telah memiliki pengalaman sebagai Bendahara Komite Sekolah dan penunjukan Ibu Woro sebagai bendahara BOS II karena Ibu Woro merupakan pribadi yang ulet dan disiplin dalam kesehariannya sehingga Kepala Sekolah mempercayai Ibu Woro dapat meringankan tugas dan kewajiban Bapak Sukandar selaku bendahara BOS I. Sedangkan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab program di sekolah ini selain berpendidikan terakhir S2 juga memiliki pengalaman antara lain pernah menjadi Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Kota Semarang.

### **2.2 Komunikasi**

Faktor komunikasi adalah faktor penting dalam proses implementasi dari sebuah kebijakan. Dengan adanya komunikasi, kebijakan yang ada dapat diinformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang



terkait lainnya. Dalam komunikasi ini, akan dibahas mengenai bagaimana proses komunikasi yang dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu komunikasi eksternal dan komunikasi internal organisasi. Komunikasi yang dilakukan pertama kali adalah sosialisasi, dimana komunikasi ini bertujuan agar implementasi program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang berjalan efektif.

#### **1.2.1.1 Sosialisasi Program BOS**

Mekanisme pelaksanaan Program BOS diawali dengan tahap persiapan, yakni tahap sosialisasi Program Bantuan Operasional Sekolah. Dalam proses implementasi suatu program, sosialisasi menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi dari kebijakan itu sendiri. Proses sosialisasi Program BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat. Proses sosialisasi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. tahap sosialisasi tingkat pusat/ nasional
2. tahap sosialisasi tingkat kabupaten/ kota
3. tahap sosialisasi tingkat sekolah (guru)
4. tahap sosialisasi tingkat sekolah (orang tua siswa)

#### **2.3 Sikap Pelaksana**

Sikap Pelaksana Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang apabila dilihat dari segi kognitif adalah mengenai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh para pelaksana Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang mengenai kewajiban atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar implementasi Program BOS bisa berjalan dengan efektif sehingga tujuan kebijakan ini bisa tercapai. Sikap ini tercermin dalam hal-hal apa saja yang telah dipenuhi oleh para pelaksana program BOS di SMK negeri 7 Kota Semarang.

Sikap pelaksana dari sisi afektif, dapat dilihat dari perasaan yang dimiliki para pelaksana (Kepala Sekolah dan Bendahara BOS) terhadap kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### **2.4 Koordinasi**

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, koordinasi menjadi penting untuk dilakukan. Koordinasi adalah suatu cara untuk mempersatukan keahlian dan perhatian, dimana semua aktor-aktor yang terlibat sadar dan bersedia secara sukarela untuk bekerjasama dalam proses implementasi di bawah pengarahannya seseorang yang memiliki kewenangan fungsional tertentu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur koordinasi di sini adalah intensitas pertemuan, dan kejelasan pembagian tugas.

##### **2.4.1 Intensitas Koordinasi**

Intensitas pertemuan koordinasi diantara pelaksana Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang dapat dikatakan sudah cukup. Koordinasi tersebut dilakukan rutin dan secara insidental. Sedangkan intensitas pertemuan koordinasi antara pelaksana Program BOS dengan para guru dapat dikatakan masih kurang. Koordinasi antara pelaksana Program BOS dengan para guru masih kurang intensif. Sedangkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dapat dikatakan sudah

cukup baik. Apabila ada kesulitan dalam mengimplementasikan Program BOS, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang melakukan koordinasi baik dengan pihak di dalam sekolah maupun pihak di luar sekolah yang terkait dalam proses implementasi program tersebut (Dinas Pendidikan dan BRI setempat). Dalam rangka proses implementasi program tersebut terdapat pertemuan rutin koordinasi yang dilakukan oleh Kepsek sebagai penanggungjawab program dan bendahara BOS setiap bulannya. Koordinasi yang dilakukan dengan pihak Dinas Pendidikan dilakukan setiap 3 bulan serta dapat pula dilakukan apabila ada hal yang tidak jelas dan harus dikonsultasikan.

Koordinasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 7 Kota Semarang dalam proses implementasi Program BOS dapat dikatakan masih kurang. Koordinasi antara pelaksana yaitu antara Kepala Sekolah dan bendahara BOS dapat dikatakan sudah cukup baik. Koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan setempat juga dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun, koordinasi antara pelaksana Program BOS (Kepsek dan Bendahara BOS) dengan para guru dapat dikatakan masih kurang.

Koordinasi antara pelaksana BOS dengan para guru di sekolah dapat dikatakan masih kurang, terlihat dengan adanya masalah dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), seperti yang telah dijelaskan oleh Bendahara BOS II dimana panitia kegiatan itu kadangkala meminta dana BOS secara mendadak serta panitia kegiatan juga tidak memahami peraturan dalam membuat LPJ sehingga mereka sering mengalami kesalahan dalam membuat LPJ.

#### **2.4.2 Kejelasan Pembagian Tugas**

Pembagian antar pelaksana Program BOS di sekolah ini dapat dikatakan sudah jelas. Hal tersebut dikarenakan pembagian tugas yang ada telah memiliki rincian aktivitas yang jelas dan tertulis, serta ditegaskan dalam SK (Surat Keputusan).

### **2.5 Tingkat Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 7 Kota Semarang**

Pengukuran efektivitas kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bagaimana kebijakan BOS dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dan pengukuran terhadap efektivitas kebijakan BOS perlu dilakukan untuk menemukan informasi sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BOS kepada penerima kebijakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi kebijakan BOS adalah adanya peningkatan kualitas para siswa, dan peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar).

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

1. Tingkat kelancaran proses implementasi Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang dapat dikatakan masih kurang. Sosialisasi program BOS kepada para pelaksana, para guru, maupun orang tua siswa kurang berhasil. Sosialisasi kepada pelaksana BOS di sekolah dikatakan belum berhasil dikarenakan juklak dan juknis dinilai rumit sehingga para pelaksana harus melakukan pembahasan bersama-sama untuk memperjelasnya. Sosialisasi kepada para guru di sekolah belum berhasil ditunjukkan oleh kesalahan-kesalahan para guru dalam proses implementasi Program BOS seperti meminta dana BOS mendadak, kesalahan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban, menghilangkan bukti pengeluaran. Sedangkan sosialisasi kepada orang tua siswa juga dikatakan belum berhasil ditunjukkan oleh hasil kuesioner yang menunjukkan hampir seluruh orang tua siswa tidak memahami sosialisasi yang diberikan oleh sekolah. Ketidapahaman tersebut terjadi karena orangtua merasa sudah tidak ada iuran sekolah sehingga mereka menyerahkan seluruh tanggungjawab kegiatan belajar anak-anaknya kepada sekolah. Oleh karena itu, para orang tua siswa merasa tidak perlu mengetahui dan memahami sosialisasi yang diberikan oleh sekolah. Ketidakpedulian orang tua siswa juga ditandai dengan tidak adanya kritik maupun saran yang diberikan kepada sekolah terkait dengan program BOS yang sedang berjalan. Kendala-kendala lain yang mengganggu kelancaran proses implementasi Program BOS di sekolah ini antara lain adalah keterlambatan pencairan dana, juklak juknis Program BOS yang rumit dan kaku menyulitkan pelaksana di tingkat sekolah dalam melakukan penyusunan RAPBS dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, serta juklak juknis Program BOS yang rumit sehingga pihak-pihak yang terkait (para guru) di sekolah kesulitan untuk memahaminya.
2. Sumber Daya Manusia yang ada di SMK Negeri 7 Kota Semarang dalam proses implementasi Program BOS dapat dikatakan sudah baik. Sebagian besar guru dan pengelola program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan. Selain itu, pengelola program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang juga telah memiliki cukup pengalaman di bidangnya masing-masing.
3. Komunikasi dalam proses implementasi Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Para pelaksana BOS (Kepala Sekolah dan bendahara BOS) telah memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Namun, tingkat kejelasan para pelaksana (Kepsek dan bendahara) dan para guru terhadap juklak dan juknis Program BOS dapat dikatakan masih kurang. Hal tersebut dikarenakan juklak juknis yang rumit dan kurangnya komunikasi internal dan eksternal yang dilakukan pihak sekolah untuk membahas peraturan yang terkait dengan kebijakan BOS.
4. Koordinasi yang dilakukan di SMK Negeri 7 Kota Semarang dengan pihak di luar sekolah (Dinas Pendidikan setempat) cukup baik. Namun, koordinasi di dalam sekolah belum berjalan dengan baik yang terlihat dari adanya kendala dalam

penyelenggaraan kegiatan yang didanai BOS, dimana para guru sebagai panitia penyelenggara kegiatan seringkali meminta dana secara mendadak, salah dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan.

5. Sikap pelaksana di SMK Negeri 7 Kota Semarang cukup baik dan mendukung proses implementasi Program BOS. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemahaman para pelaksana (Kepsek dan bendahara BOS) tentang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dan telah berusaha melaksanakannya sesuai dengan juklak juknis yang ada. Para pelaksana di sekolah ini juga berusaha sebaik mungkin dalam bertindak mengatasi permasalahan yang ada demi kelancaran proses implementasi Program BOS.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu secara keseluruhan proses implementasi Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang berjalan kurang baik. Meskipun para pelaksana Program BOS di SMK Negeri 7 Kota Semarang (Kepala Sekolah dan bendahara BOS) telah berusaha untuk mematuhi segala peraturan dan prosedur pelaksanaan kebijakan BOS, masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi sekolah. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah kegagalan dalam memberikan sosialisasi BOS kepada orangtua siswa, kesalahan dalam pembuatan LPJ, serta ketidakpahaman para guru terhadap juklak juknis kebijakan BOS. Kendala-kendala tersebut bisa terjadi karena Program BOS ini merupakan program baru sehingga sekolah membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan terbiasa dengan segala peraturan juklak juknis yang rumit.

### **3.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi dan koordinasi secara internal yang dilakukan SMK Negeri 7 Kota Semarang dalam proses implementasi Program BOS kurang berhasil. Untuk memperlancar proses implementasi Program BOS selanjutnya, SMK Negeri 7 Kota Semarang dapat melakukan beberapa hal berikut ini :
  - a. Mengadakan rapat rutin pembahasan Program BOS dalam rapat sekolah lainnya yang diikuti oleh seluruh pihak yang terkait (Kepsek, bendahara BOS, serta para guru) sehingga semua pihak di sekolah dapat memiliki pengertian dan pemahaman yang sama akan juklak juknis dan perkembangan informasi mengenai program tersebut.
  - b. Mengadakan komunikasi dan koordinasi yang lebih sering dengan Dinas Pendidikan setempat, yakni dengan datang secara langsung ataupun melalui telepon ke nomor yang secara khusus telah disediakan oleh dinas berkaitan dengan Program BOS. Komunikasi dan koordinasi tidak hanya dilakukan saat terjadi ketidakjelasan dan berkenaan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS saja, akan tetapi juga dapat dilakukan sesering mungkin sehingga dapat memperkecil masalah-masalah yang terjadi dalam proses implementasi yang terjadi karena ketidaktahuan pihak sekolah akan adanya perubahan peraturan Program BOS.

2. Berkaitan dengan adanya pertanyaan/ kritik/ saran maupun pengaduan dari orang tua siswa. Pihak sekolah dapat lebih mensosialisasikan adanya lembar pencatatan pertanyaan/ kritik/ saran maupun pengaduan yang telah disediakan sehingga berbagai pertanyaan/ kritik/ saran maupun pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada pihak sekolah dan dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
3. Pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pengelola dan pelaksana Program BOS di tingkat pusat untuk lebih memperbaiki kinerjanya, antara lain adalah mencairkan dana BOS lebih tepat waktu, dan membuat juklak juknis penggunaan dana BOS sesederhana dan sejelas mungkin sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti semua pihak yang terkait dalam proses implementasi.